

ETIKA POLITIK DAN WAYANG DALAM SASTRA INDONESIA¹

Kusmarwanti²
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Yogyakarta

1. Pendahuluan

Kondisi perpolitikan di Indonesia menunjukkan beberapa kemajuan dalam beberapa hal, salah satunya dalam masalah demokrasi. Dibandingkan masa Orde Baru dahulu, saat ini rakyat lebih mendapat ruang untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Akan tetapi, hal ini tidak selalu berarti kondisi politik di Indonesia baik-baik saja. Berbagai hal negatif seringkali mewarnai kehidupan perpolitikan Indonesia. Sebagai contoh, anggota DPR yang membolos dalam sidang selalu menunjukkan nilai yang tinggi. Vivanews pada 26 Juli 2010 mencatat dari 560 anggota DPR, hanya 407 yang mengikuti rapat paripurna. Dengan kata lain, 153 atau sekitar 27% anggota DPR tidak hadir. Meskipun demikian, kehadiran anggota dewan sejumlah itu, kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, sudah membaik dibanding sebelumnya (www.politik.vivanews.com). Ironis sekali, anggota DPR yang menjadi wakil rakyat tidak bisa mengemban amanah dengan baik.

Selain masalah anggota DPR yang membolos, masalah korupsi di Indonesia selalu menjadi pembahasan yang menarik. Dalam survei yang dirilis Political and Economic Risk Consultancy atau PERC, Indonesia menduduki peringkat tertinggi sebagai negara terkorup dari 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik. Posisi kedua ditempati Kamboja, kemudian Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Makao, Jepang, Amerika Serikat, Hongkong, Australia, dan Singapura sebagai negara terbersih (*Kompas*, 8 Maret 2010). Menyikapi kerawanan korupsi di Indonesia, Sri Mulyani Indrawati yang pada tahun 2009 masih menjabat sebagai Menteri Keuangan menyatakan bahwa kerawanan korupsi terjadi di hilir lewat praktik pungutan liar dan penyuapan kepada petugas ataupun di hulu melalui manipulasi kebijakan. Karena itu, perumusan kebijakan pemerintah harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan (*Kompas*, 18 November 2009).

Berbagai data di Indonesia tersebut hanyalah beberapa masalah yang menunjukkan pentingnya etika berpolitik bagi para pelaku pemerintahan. Hal ini menjadi penting agar penyelewengan dapat diminimalisir dan rakyat dapat memantau jalannya pemerintahan sebagai bentuk lahirnya demokrasi, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis.

Etika politik dapat digali melalui karya sastra. Masalah politik banyak direspon oleh para sastrawan dalam karyanya. Secara spesifik, para sastrawan juga sering menggambarkan masalah politik dengan memasukkan unsur wayang di dalamnya. Hal ini disebabkan wayang menggambarkan problematika politik dan kekuasaan yang kental. Makalah ini akan membahas etika politik dan wayang dalam sastra Indonesia. Selanjutnya, etika politik dan wayang tersebut akan dicermati dalam dalam tiga karya sastra dari kategori novel dan cerpen, yaitu novel *Mantra Pejina Ular* karya Kuntowijoyo, cerpen "Jenderal yang Ganas" karya Ki Slamet Gundono, dan cerpen "Cakil" karya

¹ Disampaikan dalam Seminar Internasional dalam rangka Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia (PIBSI) XXXII Se-Jateng dan DIY yang diselenggarakan oleh Universitas Widya Dharma Klaten di Yogyakarta, 8-9 November 2010

² Staf pengajar jurusan PBSI FBS UNY

Tjahjono Widijanto. Ketiga karya ini secara cukup lengkap menampilkan sikap para elite politik sehingga relevan untuk dibahas dalam makalah ini.

2. Etika Politik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2002:309), etika didefinisikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, selain tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Sementara itu, politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2002:886) didefinisikan sebagai (1) pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan, (2) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan lain-lain) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, dan (3) cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Dari dua definisi itu, maka etika politik berada dalam wilayah aturan yang harus ditaati dalam aktivitas bernegara oleh para pelakunya sebagai bagian dari kewajiban moral yang harus dijalankannya.

Berbeda dengan definisi di atas, Surbakti (1998:2) mendefinisikan politik dalam lima hal berikut ini. *Pertama*, politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik adalah segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, politik adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, politik adalah konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Kelima definisi ini mengisyaratkan adanya lima unsur penting dalam politik yaitu tujuan bersama, penyelenggaraan negara dan pemerintah, kekuasaan, kebijakan, dan konflik.

Dalam kata pengantar buku *Etika Politik Pejabat Negara*, Sudarminta (1999:viii) menyebutkan bahwa etika politik menjadi penting karena fakta sejarah menunjukkan para pelaku politik seringkali menghalalkan segala cara untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Konflik kepentingan antarpol, antargolongan, antarkelompok, dan antara pribadi sering muncul di kalangan para elit politik. Jalan kekerasan pun tidak jarang ditempuh. Sementara itu, rambu-rambu moral yang seharusnya dipakai sebagai acuan dalam berpolitik hanya menjadi retorika politik. Rambu-rambu moral dalam berpolitik dapat dianalogikan dengan rambu-rambu lalu lintas. Jika rambu-rambu lalu lintas yang di ada tidak dipatuhi, maka akan terjadi kekacauan di jalan raya. Dalam dunia politik, jika rambu-rambu politik itu tidak dipatuhi, maka kekacauan dalam negara pun terjadi. Korban terbesar dalam kekacauan itu adalah rakyat.

Sementara itu, menurut Hasan (*Pikiran Rakyat*, 8 November 2008), inti dari permasalahan etika politik adalah masalah legitimasi etis kekuasaan. Etika politik berkaitan dengan hak moral untuk memegang dan mempergunakan kekuasaan yang mereka miliki. Etika politik juga berkuat pada permasalahan tanggung jawab. Seorang elit politik harus mampu mempertanggungjawabkan kekuasaan yang dimilikinya. Lebih lanjut, Hasan menyatakan bahwa dalam negara-negara yang memiliki tradisi demokrasi yang mapan, persoalan moralitas dalam politik merupakan penentu karir politik. Mereka secara sadar akan memutuskan mundur jika ada indikasi keterlibatan dalam pelanggaran moral. Hal itu disebabkan oleh kesadaran bahwa pelanggaran moral merupakan aib politik yang akan mendegradasi legitimasi etis mereka pada level yang sangat rendah.

Berangkat dari pendapat tersebut, maka etika politik berlaku bagi para pelaku politik. Karena itu, pembahasan etika politik ini difokuskan pada para pelaku politiknya. Pelaku politik yang dimaksudkan di antaranya adalah kepala negara (penguasa), militer, dan legislatif.

3. Politik, Wayang, dan Karya Sastra

Wayang memiliki fungsi hiburan, pendidikan, religius, sosial, dan politik. Terkait dengan fungsinya yang terakhir, wayang dapat menjadi sarana komunikasi politik. Menurut Foley (melalui Walujo, 2000:82), dalam kehidupan sosial politik, para dalang mengemban dua fungsi utama, yaitu menyampaikan pesan pemerintah kepada rakyatnya dan menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah.

Fungsi politik wayang dapat dilihat pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Wayang pernah dipentaskan untuk mengkritik pemerintahan kolonial Belanda melalui lakon "Pandawa Main Dadu". Dalam lakon tersebut, Pandawa diceritakan mengalami kekalahan dalam bermain dadu dengan Kurawa sehingga Pandawa harus menerima hukuman selama 13 tahun di hutan Kamiyoko. Dalam hal ini Kurawa merupakan simbol pemerintah kolonial Belanda, sedangkan Pandawa merupakan simbol Soekarno, Hatta, dan pemimpin yang lain yang saat itu dibuang ke Digul Irian Jaya. Sementara itu, pada zaman pemerintahan Jepang, wayang digunakan sebagai alat propaganda politik. Pemerintah Jepang sering membayar para dalang untuk memainkan lakon dengan tujuan menonjolkan citra baiknya (Foley melalui Walujo, 2000:103-104).

Menurut Clark (2008:28), bukan hanya pada masa penjajahan, pada masa sesudah kemerdekaan wayang juga dimanfaatkan sebagai propaganda partai politik. Pada masa Soekarno, partai-partai sering menyimbolkan dirinya sebagai Pandawa. Pada masa Orde Baru Soeharto, wayang sering digunakan sebagai propaganda partai, terutama Golongan Karya (Golkar) sebagai mesin politik pemerintah. Selain sebagai propaganda partainya, menurut Sears (melalui Clark, 2008:23), pementasan wayang pada masa ini juga dimanfaatkan untuk propaganda pembangunan, misalnya pembangunan ekonomi dan keluarga berencana.

Wayang tidak saja hadir dalam dunia atau realitas politik. Akan tetapi, wayang juga hadir dalam karya sastra untuk mengungkapkan masalah politik. Wayang menampilkan problematika kekuasaan yang kental, yang relevan dengan kondisi perpolitikan di Indonesia. Masalah wayang dan politik sebelumnya telah banyak dibahas dalam karya sastra, baik dari kategori novel maupun cerpen. Dalam novel hal ini tampak di antaranya dalam *Baratayuda di Negeri Antah Berantah* karya Pipit Rokhijat, *Perang* karya Putu Wijaya, *Balada Nasaroma*, *Balada Cinta Abimanyu*, dan *Lady Sundari* karya Agusta Wibisono, *Gerakan Punokawan atawa Arus Bawah* karya Emha Ainun Nadjib, *Mantra Pejina Ular* karya Kuntowijoyo, dan *Anak Bajang Menggiring Angin* karya Sindhunata. Sementara itu, dalam cerpen hal ini tampak di antaranya dalam cerpen "Kabesmen" karya Whani Dharmawan, cerpen "Presiden Dosomuko" karya Pipit Rokhijat, cerpen "Lengsernya Rahwana" karya Martin Suhartono, cerpen "Cakil" karya Tjahjono Widijanto, dan cerpen "Jenderal yang Ganas" karya Ki Slamet Gundono.

4. Etika Politik dan Wayang dalam Karya Sastra

Sebagaimana ditulis di atas, pembahasan ini mengangkat novel *Mantra Pejina Ular* karya Kuntowijoyo, cerpen "Jenderal yang Ganas" karya Ki Slamet Gundono, dan cerpen "Cakil" karya Tjahjono Widijanto. Novel *Mantra Pejina Ular* pada awalnya merupakan cerita bersambung pada harian *Kompas* edisi 1 Mei sampai 8 Juli 2000, yang selanjutnya dibukukan dan diterbitkan oleh Penerbit Kompas. Cerpen "Jenderal yang Ganas" yang pernah dimuat di harian *Jawa Pos* pada 15 Maret 2009 mengangkat latar Kerajaan Alengka dan sikap para jenderal-jenderalanya dalam menghadapi pasukan Ramawijaya. Sementara itu, cerpen "Cakil" yang pernah dimuat di *Seputar Indonesia* pada

10 Februari 2010 mengangkat perseteruan Cakil dan para ksatria Pandawa. Pembahasan etika politik dalam karya sastra ini difokuskan pada etika para elite politik.

Dalam dunia pewayangan, kepala negara adalah raja, yang mengepalai sebuah kerajaan. Dalam novel *Mantra Pejajak Ular*, etika kepala negara dapat dilihat pada etika Raja Parikesit dari Astina, Raja Raksana dari Kerajaan Puserbumi, Raja Gajah dari negeri kambing (wayang fabel), dan Raja Rahwana dari Alengka.

Kisah Parikesit dapat dicermati dari lakon wayang "Perjamuan Ular". Lakon ini mengangkat cerita kematian Parikesit yang dibunuh oleh Naga Taksaka sebagaimana tampak pada kutipan berikut.

... Prabu Parikesit diramal seorang pendeta bahwa ia akan mati karena gigitan ular. Karena ular itu pasti tempatnya di bawah, dekat tanah, maka dia membangun menara yang tinggi sekali. Seekor naga, Naga Taksaka, berusaha merenggut jiwanya. Tapi apa akal, Prabu Parikesit tinggal di menara dijaga prajurit. Suatu kali dia melihat kesempatan. Seorang pendeta menghaturkan jambu air pada raja, ia menjelma jadi ulat dalam buah jambu. Tanpa curiga jambu pun sampai di meja raja. Maka Naga Taksaka keluar dan jadi naga yang sesungguhnya. Menggigit Raja Parikesit sampai meninggal ... (Kuntowijoyo, 2000:59).

Kematian Parikesit bermula dari kutukan Srenggi, anak seorang pertapa yang pernah diganggu oleh Parikesit. Saat itu Parikesit sedang berburu dan kehilangan sasaran buruannya seekor rusa. Parikesit bertanya kepada ayah Srenggi yang baru bertapa dan tidak dijawab. Parikesit marah dan mengalungkan bangkai ular ke leher ayah Srenggi. Srenggi pun marah dan menjatuhkan kutukan bahwa dalam waktu tujuh hari Parikesit akan digigit ular. Ayah Srenggi pun membatalkan tapanya dan menyarankan agar Parikesit meminta maaf pada Srenggi agar kutukan itu dicabut tetapi Parikesit tidak bersedia. Sebagai raja ia malu meminta maaf kepada rakyat biasa seperti Srenggi.

Parikesit mewakili penguasa yang sewenang-wenang pada rakyatnya. Ia seharusnya paham bahwa orang bertapa harus diam dan tidak boleh bicara. Nafsu menangkap hewan buruan yang tidak bisa terkendalikan pun mendorongnya untuk melakukan perbuatan keji, yaitu mengalungkan bangkai ular ke leher sang pertapa. Nafsu menangkap hewan buruan bagi Parikesit seperti nafsu memperoleh harta dunia. Karena kepentingan harta ini, banyak penguasa melakukan segala cara untuk mendapatkannya, di antaranya adalah korupsi yang merugikan negara dan rakyat.

Selain data korupsi yang telah disebutkan di atas, data korupsi pada masa pemerintah Orde Baru dapat dicermati juga. Menurut laporan Bank Dunia tahun 1997, diperkirakan 20-30% dana pembangunan diselewengkan selama Orde Baru. Sementara itu, tahun 2004 Transparency International mengumumkan 10 pemimpin paling korup di dunia. Dari 10 pemimpin itu, 3 di antaranya adalah pemimpin Asia Tenggara yang selalu menggembar-gemborkan pembangunan, yaitu Soeharto presiden Indonesia dengan nilai korupsi 15–35 miliar dolar, Ferdinand Marcos presiden Filipina dengan nilai korupsi 5-10 miliar dolar, dan Joseph Estrada presiden Filipina juga dengan nilai korupsi 78-80 juta dolar (Collins, 2008:257).

Parikesit juga mewakili penguasa yang otoriter. Segala keinginan penguasa harus terpenuhi. Orang-orang yang ada di bawahnya harus tunduk pada penguasa, termasuk rakyat seperti Srenggi. Ia mengambil jarak dengan rakyatnya sehingga untuk meminta maaf pun ia enggan. Ia tidak mau ditentang dan selalu merasa benar.

Hal ini tidak sejalan dengan isu demokrasi yang selama ini dihusung oleh Indonesia. Kristiadi (2008:1) berpendapat bahwa secara ideal demokrasi seharusnya menjadi sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai, etika, dan peradaban yang menghargai martabat manusia. Akan tetapi, konsep ideal ini tidak mudah dilaksanakan karena penguasa seringkali memonopoli kekuasaan, bahkan memonopoli kebenaran. Kebenaran menjadi milik penguasa sehingga perbedaan pendapat dianggap sebagai tindakan kriminal atau subversi yang harus ditindak oleh negara.

Kisah Raja Raksasa dari Puserbumi dapat dicermati pada lakon wayang "Bambang Indra Gentholek Takon Bapa". Raja Raksasa ini dikenal serakah dan suka merebut wilayah kekuasaan orang lain. Dalam lakon ini Raja Raksasa akan merebut kerajaan Amarta sebagaimana tampak dalam kutipan ini.

- Raja : Rakyat semakin banyak memerlukan tanah yang semakin luas. Yang makan bertambah, tapi yang dimakan tetap. Menurut perhitungan para ahli, 25 tahun lagi kita tidak akan bisa memberi makan penduduk. Sudah waktunya kita memperluas kerajaan.
- Senapati : Katakan saja, kerajaan mana yang akan direbut?
- Raja : Saya dengar berita, kerajaan Amarta subur. Kiranya itulah yang menjadi sasaran kita.
- Senapati : Setuju! Mereka lalu berangkat (Kuntowijoyo, 2000:67).

Selain pada Raja Raksasa di Puserbumi, keserakahan penguasa juga tampak pada Raja Gajah di negeri kambing dalam lakon "Gajah Jadi Raja di Negeri Kambing". Jika Raja Puserbumi melakukan penyerangan untuk menduduki Amarta, maka Raja Gajah sudah menduduki Negeri Kambing. Kedua raja ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengeruk kekayaan negerinya dengan serakah. Lakon wayang "Raja Gajah di Negeri Kambing" tampak pada kutipan berikut.

"Gajah Jadi Raja di Negeri Kambing" itu begini. Raja Negeri Kambing kosong. Parlemen kambing mengadakan kontes untuk mengisinya. Banyak binatang ikut kontes; dari yang cerdas seperti halnya kancil, yang berbisa seperti halnya ular, yang cepat larinya seperti halnya kijang, sampai yang besar seperti halnya gajah. Parlemen memilih gajah. Mula-mula mereka senang, punya raja yang besar, kuat, dan gagah-perkasa. Akan tetapi, makin lama gajah makin kelihatan belangnya. Gajah mengundang saudara-saudaranya untuk tinggal di Negeri Kambing. Akibatnya, seluruh sumber daya hutan dihabiskan mereka: danau, rumput, dan pohon. Kambing-kambing masih harus membayar upeti berupa rumput yang makin lama makin langka. Tidak tahan, kambing-kambing pun melakukan exodus. Habis sumber daya hutan dan tidak ada lagi upeti, gajah-gajah pun juga meninggalkan tempat itu. Ketika kambing-kambing kembali, mereka tidak lagi suka kepada yang serba gagah-perkasa tapi membuat sengsara, lalu memilih raja dari bangsa kambing sendiri. Mereka pun hidup bahagia selama-lamanya (Kuntowijoyo, 2000:221-222).

Kisah Raja Rahwana dapat dilihat pada lakon wayang "Rama Tambak" sebagaimana tampak dalam kutipan berikut.

... Katanya, "Intuisi saya mengatakan bahwa sudah tiba waktu-nya Rahwana dipecundangi kera-kera. "Rama Tambak" adalah lakon yang pas saat ini." "Rama

Tambak" menceritakan bagaimana kera-kera membantu Rama dengan membuat jalan laut yang menghubungkan daratan dengan Alengka. Raja Rahwana sudah keterlaluannya angkara murkanya. Setelah jalan laut selesai, maka dengan mudah prajurit-prajurit Rama menyeberang. Mereka pun mengalahkan Alengka (Kuntowijoyo, 2000:210).

Dalam novel *Mantra Pejajak Ular*, pementasan lakon wayang "Rama Tambak" ini diikuti dengan *headline* surat kabar "Rama Tambak sebagai Prediksi Sejarah" yang membuat gubernur marah besar. Tulisan ini mengisyaratkan tanda-tanda runtuhnya keserakahan dan keangkaramurkaan Rahwana yang dianalogikan sebagai pemerintah Orde Baru.

Penguasa pada lakon wayang ini merupakan refleksi penguasa dalam novel *Mantra Pejajak Ular*, yaitu gubernur, bupati, camat, dan lurah. Demi kekuasaan penguasa melakukan upaya-upaya yang tidak *fair* dalam menjalankan pemerintahan. Calon lurah bekerja sama dengan mesin politik untuk memenangkan pemilihan dengan jaminan wilayahnya akan mendukung sepenuhnya pada partai yang menjadi mesin politik dalam pemilu. Lurah pun terpilih bukan karena kapasitas, tetapi karena keberhasilan lobinya dengan mesin politik. Selain itu, program pembangunan pun disusun dengan berbagai kepentingan. Lomba desa yang menjadi ajang kompetisi prestasi ternyata hanya menjadi permainan para penguasa. Pemenang lomba desa dipergilirkan setiap tahun untuk membangun opini adanya pemerataan pembangunan yang menjadi kriteria sukses penguasa. Karena itu, sebelum lomba dilaksanakan para camat sudah mengetahui pemenang lomba. Penguasa juga mudah saja mengangkat dan memberhentikan para penguasa di bawahnya. Karena ketundukan dan kepatuhannya pada atasan, Camat I Kemuning dipromosikan menjadi pembantu bupati. Sebaliknya, karena tidak sejalan dengan mesin politik, Abu Kasan Sapari dan Camat II Kemuning disingkirkan dan dipindahkan ke tempat lain yang tidak strategis.

Keangkaramurkaan Rahwana juga dapat dicermati dalam cerpen "Jenderal yang Ganas". Cerpen yang berlatar Kerajaan Alengka ini menggambarkan persiapan mereka menghadapi pasukan Ramawijaya. Kekuatan keluarga Alengka itu terbagi. Dalam cerpen ini muncul tokoh Jenderal Kumbakarna dan Jenderal Gunawan Wibisana yang merupakan adik Rahwana. Mereka mengutuk keserakahan dan kejahatan Rahwana kakaknya. Mereka maju melawan pasukan Ramawijaya karena kecintaannya pada kerajaan, bukan karena membela Rahwana. Karena itu, sebelum berangkat berperang Jenderal Gunawan Wibisana berpesan, "Perang kita dengan pasukan Ramawijaya harus *gentlemen*. Tidak boleh main bius, apalagi main culik. Jaga Jenderal Indrajit yang tidak sabaran." Indrajit adalah putra sulung Rahwana yang kejam. Pesan ini pun diam-diam disampaikan Jenderal Kumbakarna dan Jenderal Togog (Semar) ke Ramawijaya melalui Hanoman.

Bagi Rahwana, Kumbakarna dan Gunawan Wibisana adalah pengkhianat Alengka karena bersekutu dengan Ramawijaya. Jenderal Indrajit tidak tinggal diam. Ia menyerang pasukan Hanoman yang akan membantu Ramawijaya dengan senjatanya Megananda sehingga pasukan Hanoman semuanya gugur terkena racun Indrajit. Kabar ini pun membuat Rahwana merasa menang sebagaimana tampak dalam kutipan berikut.

Esoknya, Ramawijaya mengecam keras serangan tersebut. Media mulai menulis buku biografi Jenderal Indrajit. Di Osaka Royal Hotel, Rahwana tersenyum puas. Sebuah sejarah kelam telah diwariskan dengan sempurna. Dan Rahwana sebagai tokoh paling ganas di Alengka luput dari jeratan hukum yang lemah dan korup (Gundono, *Jawa Pos*, 15 Maret 2009)

Kisah ini menggambarkan kejahatan dan keangkaramurkaan penguasa yang abadi. Rahwana yang sedang mabuk cinta dengan Sinta tidak perlu menggunakan tangannya untuk memenangkan Alengka. Perpanjangan tangan kekuasaan pun menjadi satu hal yang wajar dalam dunia politik. Saat seorang kepala negara berada dalam posisi tidak aman, ia bisa memanfaatkan perangkat-perangkat lain, seperti menteri, DPR, dan sebagainya. Bagi Rahwana, ia memanfaatkan anaknya, Indrajit, untuk menegakkan kekuasaannya. Ia juga memanfaatkan hukum yang tidak mampu menjeratnya. Rahwana adalah penguasa yang kebal hukum. Meskipun banyak orang mengutuknya (termasuk Kumbakarna dan Wibisana), tetapi ia tetap bisa eksis sebagai penguasa Alengka.

Keterlibatan militer dalam menegakkan kekuasaan tampak dalam novel *Mantra Pejina Ular*. Militer melakukan penangkapan terhadap seorang dalang Abu Kasan Sapari yang tidak sejalan dengan mesin politik. Ia dianggap sebagai oposisi dan mendapat julukan "Dalang Anti Randu" karena sering mendalang untuk calon-calon lurah yang tidak didukung oleh partai Randu sebagai Mesin Politik. Penangkapan ini dilakukan tanpa alasan yang jelas. Polisi sendiri bingung ketika ditanya alasan penangkapan itu. Bagi mereka, ini adalah tugas. Tampak sekali bahwa penangkapan aktivis adalah rekayasa politik. Hal ini semakin dimengerti karena penangkapan Abu Kasan Sapari bertepatan dengan pelaksanaan Pemilu 1997. Begini cara penguasa mengamankan suara dalam pemilu.

Etika politik legislatif dapat dicermati dalam cerpen "Cakil". Anggota legislatif dalam cerpen ini terdiri dari para ksatria Pandawa, yaitu Yudistira, Bima, Nakula, Sadewa, Setyaki, Abimanyu, dan sebagainya. Para ksatria ini resah dan protes karena para dalang membuat sayembara pengganti Cakil dengan iming-iming gaji yang lebih tinggi dari gaji mereka. Dalam dunia pewayangan Cakil dan para ksatria itu memiliki status yang sangat berbeda. Cakil adalah seorang raksasa yang hanya berprofesi penjaga batas wilayah, sementara para ksatria itu adalah para pejabat negara yang menentukan nasib kerajaan.

Sementara itu, Cakil yang menghilang dari jagad pewayangan diceritakan turun ke bumi dan menjadi seorang pengusaha sukses. Untuk memenangkan tender bertaraf internasional, ia disarankan oleh para penasihatnya untuk melakukan lobi pada menteri dan DPR. Cakil pun menghadap menteri dan ia kaget luar biasa ternyata menteri itu adalah Arjuna. Cakil pun lari terbirit-birit. Dalam dunia pewayangan, Cakil dikisahkan terlibat Perang Kembang dengan Arjuna dan mati tertikam kerisnya sendiri. Selanjutnya, Cakil menghadap DPR. Ia pun kaget luar biasa karena anggota DPR itu adalah para ksatria Pandawa musuhnya. Ia lari terbirit-birit dan berhenti di sebuah *traffic light*. Di tempat itu ia disapa seorang pengendara BMW mewah yang ternyata adalah Semar. Cakil pun pingsan.

Bagi para pejabat, gaji menjadi masalah yang sensitif. Tuntutan gaji dan fasilitas harus diakui menjadi daya tarik penting bagi para calon anggota dewan. Untuk lolos di kursi legislatif, seorang calon anggota dewan menghabiskan ratusan juta rupiah untuk kampanyenya. Karena itu, tuntutan terhadap gaji pun menjadi signifikan bagi mereka. Selain gaji, fasilitas juga penting. Baru-baru ini Indonesia diramalkan oleh pro kontra rencana pembangunan gedung DPR yang menghabiskan dana senilai 1,168 triliun rupiah. Harga ini setara dengan pembangunan 12 ribu gedung sekolah. Gedung ini juga dilengkapi dengan fasilitas mewah, seperti fasilitas spa, kolam renang, karaoke, dan sebagainya (www.tribunnews.com).

Cerpen "Cakil" ini mewakili kemenangan para ksatria karena mereka duduk sebagai penentu kebijakan, yaitu menteri dan anggota DPR, yang bisa menentukan hasil lobi. Cakil pun lagi-lagi menjadi pihak yang kalah. Dalam dunia pewayangan, Cakil adalah

raksasa yang serakah dan suka merampas harta orang. Ia mewakili rakyat kecil sebagaimana para punokawan. Karena itu, ia *shock* dan pingsan melihat Semar telah berubah status menjadi orang kaya dengan BMW-nya yang mewah.

5. Penutup

Beberapa karya sastra mengangkat unsur wayang dalam penceritaannya. Wayang dalam karya sastra tersebut merefleksikan etika politik para pelakunya. Hal ini disebabkan wayang menampilkan problematika politik dan kekuasaan yang kental. Melalui tiga karya sastra yang dibahas dapat dicermati etika penguasa, militer, dan legislatif melalui konflik politik para tokohnya.

Daftar Pustaka

Clark, Marshall Alexander. 2008. *Wayang Mbeling Sastra Indonesia Menjelang Akhir Orde Baru*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan pembangunan

Collins, Elizabeth Fuller. 2008. *Indonesia Dikhianati* (diterjemahkan Herul Fathony). Jakarta: Gramedia

Gundono, Ki Slamet. 2009. "Jenderal yang Ganas". *Jawa Pos*. Edisi 15 Maret 2009.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Hasan, Iding R. 2008. "Etika Politik Calon Legislatif". *Pikiran Rakyat*. Edisi 8 November 2008

Kompas. 2010. "PERC: Indonesia Negara Paling Korup!". 8 Maret 2010. Jakarta

_____. 2009. "Indeks Korupsi Indonesia Rawan". 18 November 2009. Jakarta.

Kristiadi, J. 2008. *Demokrasi dan Etika Bernegara*. Yogyakarta: Kanisius

Kuntowijoyo. 2000. *Mantra Pejina Ular*. Jakarta: Penerbit Kompas

Sudarminto, Y. 1999. "Kata Pengantar" dalam *Etika Politik Pejabat Negara* (Dennis F. Thompson, diterjemahkan Benyamin Molan). Jakarta: Yayasan Obor

Surbakti, Ramlan. 1998. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo

Vivanews. 2010. "153 Anggota DPR Bolos Rapat Paripurna". Diakses dari www.politik.vivanews.com pada 10 Oktober 2010.

Walujo, Kanti. 2000. *Dunia Wayang: Nilai Estetis, Sakralitas, dan Ajaran Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Widijanto, Tjahjono. 2010. "Cakil". *Seputar Indonesia*. Edisi 10 Februari 2010.

www.tribunnews.com. 2010. "Biaya Gedung DPR Cukup untuk Bangun 12 Ribu Sekolah".
Diakses pada 13 Oktober 2010.